

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Hasil Penelitian Wahyu Suryani dkk (2019) menunjukkan bahwa pada perkembangan atau pertumbuhan Wajib Pajak beserta diterimanya PPh yang bersifat Final di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan dihasilkan bahwa untuk peningkatan wajib pajak UMKM tidak beda peningkatan wajib pajak UMKM yang awal dan setelah pengalihan PP 46 tahun 2013 berubah PP 23 tahun 2018 sektor diterimanya PPh Final menghasilkan jika ada beda tingkat pendapatan diterimanya PPh Final awal dan setelah pengalihan Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018.

Hasil penelitian Nangoi dan Hakim (2015) bahwa setelah berlakunya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan Wajib Pajak sebesar 0,23% sedangkan rata-rata penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) dari PPh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selama 17 (tujuh belas) bulan sejak berlakunya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yaitu sebesar 3,8% dalam kriteria sangat kurang.

Hasil penelitian Tjiali (2015) bahwa dari rata-rata perkembangan atau pertumbuhan jumlah Wajib Pajak (WP) selama 26 (dua puluh enam) bulan sebelum dan sesudah penerapan, menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan jumlah Wajib Pajak sebesar 6,11%. Dilihat secara tahunan, jumlah Wajib Pajak mengalami peningkatan pada saat tahun 2014 dan 2015 sesudah penerapan. Rata-rata kontribusi PPh Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 terhadap PPh Pasal

4 ayat (2) selama 26 bulan sampai bulan september 2015 sesudah penerapan yaitu sebesar 5,98% dengan kriteria sangat kurang.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Pajak**

Ada beberapa pengertian pajak dibawah ini yang telah dikemukakan oleh para ahli di dalam bidang perpajakan yang pengertiannya berbeda namun inti dan tujuannya sama.

Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat ( dalam Siahaan, 2010) “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum”.

Definisi pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang gterutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”(Halim , Dara, & Bawono, 2016)

## 2. Jenis – jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, sebagai berikut:

### a. Pajak Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan Pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

### b. Pajak Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

### c. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya (Halim dkk, 2016)

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Provinsi, terdiri atas : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak kabupaten/Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

### 3. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu :

- a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang tinggi

terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah (Waluyo & Wirawan B., 2000)

#### 4. Tata Cara Pemungutan Pajak

##### a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

##### 1) Stelsel Nyata ( riil stelsel )

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan adalah pajak yang dikenakan lebih realitis. Sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan riil diketahui.

##### 2) Stelsel Anggapan ( Fictieve stelsel )

Pengenaan pajak merupakan suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini merupakan pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.

Sedangkan kekurangannya yaitu pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

### 3) Stelsel Campuran

Stelsel merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. (Mardiasmo, 2011)

### b. Asas Pemungutan Pajak

#### 1) Asas domisili (asas tempat tinggal )

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang Bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri.

#### 2) Asas Sumber

Merupakan negara yang berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak tersebut.

### 3) Asas Kebangsaan

Merupakan pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.

#### c. Sistem Pemungutan Pajak

##### 1) *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

##### 2) *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang

##### 3) *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2011).

## 5. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan sebagai bagian integral dari undang-undang perpajakan telah dikenal sejak zaman Belanda. Perkembangan dan perbaikan terhadap Undang-undang tersebut merupakan proses yang dilalui menuju penyempurnaan dalam hal pelaksanaan Undang-undang pajak itu sendiri.

Pada awal kemerdekaan dan selama revolusi, tidak ada pemungutan pajak yang berarti walau ada kantor iuran negara yang menerima pajak dari beberapa pedagang. Sesudah kedaulatan RI, peraturan perpajakan Belanda digunakan kembali sambil dilakukan pentaan dan perluasan. Undang-undang PPh terbaru yakni Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sedangkan aspek hukumnya digeser ke dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pajak Penghasilan berikut ini didasarkan pada Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah,



Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jendral Pajak (Tjahjono & Husein , 2009) .

#### 6. Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 UU PPh, pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupahadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan dibursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/ atau bangunan.
- e. Penghasilan tertentu lainnya ( penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).

#### 7. Dasar Pengenaan PPh Final Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018.

Secara perhitungan pajak penghasilan final terutang menurut Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018 relatif sama, yaitu dengan tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Namun, terkait dengan istilah dasar pengenaan pajak antara Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018 yang memiliki pengertian dan penjelasan yang berbeda. Menurut Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 dasar pengenaan pajak untuk perhitungan PPh Final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018 dasar pengenaan pajak untuk perhitungan PPh Final juga peredaran bruto. Perbedaan dari keduanya antara Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018 terletak pada pengertian peredaran bruto tersebut. Peredaran bruto dalam Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018 adalah jumlah peredaran bruto berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang untuk Wajib Pajak Badan, dan termasuk peredaran bruto istri untuk Wajib Pajak orang pribadi. Peredaran bruto yang dimaksud merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenisnya. Penjelasan ini tidak terdapat di PP 46 tahun 2013.

Dalam Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018 memberikan ketentuan tambahan bagi wajib pajak tertentu. Wajib Pajak tertentu ini adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk membayar pajak sesuai Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak dalam Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018, yaitu :

- a. Penghasilan berasal dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah Rp. 4.800.000.000,00 (Rp. 4,8 Miliar) sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 berlaku, dikenai pajak Penghasilan dengan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulan.
- b. Penghasilan berasal dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah Rp. 4.800.000.000,00 ( Rp.4,8 Miliar) sejak Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai pajak Penghasilan 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan.
- c. Penghasilan berasal dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah Rp. 4.800.000.000,00 ( Rp.4,8 Miliar) mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat 1 huruf (a), Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-undang Pajak Penghasilan (Gunarto, 2018).